

**PEMERINTAH KABUPATEN
MANGGARAI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
(D L H)**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2024**



RUTENG, 12 FEBUARI 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi tahun 2024 tepat waktu. Selanjutnya hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2024, disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2024, dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan, kendala dan solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja (RK) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dibuat, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, untuk kemudian menjadi tolak ukur peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2024 ini, dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Ruteng, 12 Februari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Manggarai,

CHARLESSON Z. RIHIMONE, S.KOM
Pembina Tk. I

NIP. 19720601 200003 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2024 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, melaksanakan **6 (Enam Program)** program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam **10 (Sepuluh)** kegiatan dan **17 (Tujuh Belas)** sub kegiatan. Seluruh Program/Kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2024 untuk mencapai 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja. Dengan kata lain seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 1 (satu) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah **105,03 %** dengan kategori "**MEMUASKAN**" sesuai kategori dalam tabel berikut.

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>85 s/d 100	MEMUASKAN
2	A	>75 s/d 85	SANGAT BAIK
3	B	>65 s/d 75	BAIK
4	CC	>50 s/d 65	CUKUP BAIK
5	C	>30 s/d 50	AGAK KURANG
6	D	0-30	KURANG

Keberhasilan sasaran strategis tersebut secara umum disebabkan oleh:

1. Ada 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja > 100%;
2. Tingkat capaian Persentase Indeks kualitas udara (IKU) mencapai 103,7%
3. Tingkat capaian Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 mencapai 210,3%.

Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp**7.938.932.589,-** dengan realisasi penyerapan sebesar Rp**7.775.910.274,-** atau mencapai **97,95%** dan sisa anggaran sebesar Rp**163.022.315** atau sebesar 2,05%.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja adalah sebesar Rp 4.805.551.618,- atau sebesar 60,53% dari total anggaran. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan. Realisasi pengeluaran dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp 4.722.788.145,- atau 98,27% dari dana

yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Sistematika Penulisan	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1. Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai 2021-2026.....	27
2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026.....	29
2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja.....	31
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	34
3.3. Pengukuran Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Renstra 2021-2026.....	45
3.4. Akuntabilitas Keuangan	47
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut: **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.**

Tujuan ini dapat dicapai melalui sasaran berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Air;
2. Meningkatkan Kualitas Udara;
3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan;
4. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan pada tahun 2024 telah seluruhnya dilaksanakan. Situasi dan kondisi masyarakat Manggarai yang kondusif telah memungkinkan terlaksananya berbagai kegiatan pembangunan. Selain itu, adanya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam bentuk dukungan anggaran yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup merupakan faktor penting yang menentukan terlaksananya seluruh kegiatan secara efektif.

Untuk memenuhi asas pemerintahan yang baik (*good governance*), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang menggambarkan capaian-capaian dari setiap program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2024 yang lalu. Meski seluruh program dan kegiatan telah dapat

diselesaikan, namun harus diakui bahwa tetap ditemui berbagai permasalahan yang senantiasa membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam proses mencari solusi yang efektif.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai dilaksanakan oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas konkuren wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Organisasi

Selanjutnya, Struktur Organisasi BLHD Kab. Manggarai terdiri dari:

a) Kepala

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan perencanaan bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah B3, peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

b) Sekretariat

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan dan Keuangan, Urusan Umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana operasional sekretariat;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
- d. mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;

- f. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat membawahi dua sub bidang sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
 - c. menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
 - d. mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
 - e. mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
 - g. melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
 - h. mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
 - i. menyusun laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
 - c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik negara/kekayaan daerah;
 - d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

c) Bidang Penataan dan Penuaan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penuaan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan dan penuaan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Penuaan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja bidang penataan dan penuaan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang penataan dan penuaan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menginventarisir data dan informasi sumber daya alam;
- d. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- e. mengoordinasikan dan mensinkronkan pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- h. mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) & Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. mensinkronkan RLPLH Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
- k. menyusun NSDA dan LH, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis kabupaten;
- n. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- o. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. memantau dan mengevaluasi KLHS;
- r. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. melaksanakan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- w. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan;
- x. mengelola lingkungan hidup;
- y. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- z. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- aa. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- bb. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- cc. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- dd. sosialisasi tata cara pengaduan;
- ee. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ff. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- hh. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ii. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- jj. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- kk. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

- ll. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- mm. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- nn. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- oo. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi tiga substansi, yaitu :

- (1) Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas :
 - a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. penyusunan NSDA dan LH;
 - j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. penyusunan KLHS Provinsi;
 - n. Pengesahan KLHS;
 - o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - u. pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
 - v. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Substansi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, melaksanakan tugas:
- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Substansi Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau Kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- i. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang penataan pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;

- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan,

- perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait

- dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
 - nn. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;

- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- ccc. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas membawahi 3 substansi:

- (1) Substansi Pengelolaan Sampah, melaksanakan tugas :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
 - g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;

- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - w. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Substansi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, melaksanakan tugas :
- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
 - d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
 - i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan

j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :

- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- aa. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi tiga substansi yaitu :

- (1) Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, melaksanakan tugas :
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).;
 - l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Substansi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, melaksanakan tugas :
- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- (3) Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas :
- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

d) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

1.2.4 Sumber Daya Manusia

Dari sisi Sumber Daya Manusia, DLH Kabupaten Manggarai memiliki 46 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun rincian PNS di DLH Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:

Sarjana (S1)	: 18	Orang
Diploma	: 2	Orang
SLTA	: 16	Orang
SLTP	: 2	Orang
SD	: 6	Orang

b) Berdasarkan Golongan:

Golongan IV	: 5	Orang
Golongan III	: 19	Orang
Golongan II	: 12	Orang
Golongan I	: 8	Orang

c) Berdasarkan Jabatan Struktural:

Eselon II	: 1	Orang
Eselon III	: 4	Orang
Eselon IV	: 1	Orang
Staf	: 29	Orang

d) Berdasarkan Berdasarkan Jabatan Fungsional : 8 orang

e) **Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis di Bidang Lingkungan Hidup:**

Diklat AMDAL Penilai	: 2 Orang
Diklat AMDAL Penyusun	: 1 Orang
Diklat Laboratorium Lingkungan	: 1 Orang
Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan	: 1 Orang
Diklat UKL/UPL	: 1 Orang
Diklat Sistem Informasi Lingkungan	: 1 Orang
Diklat Audit Lingkungan	: - Orang
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	: 2 Orang

1.3 Sistematika Penulisan

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi organisasi serta struktur dan sumber daya manusia yang dimiliki.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang perencanaan dan kesepakatan capaian kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran (tahun 2024).

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisa atas capaian kinerja pada tahun 2024.

BAB IV: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari analisa atas capaian kinerja tahun 2024 dan strategi yang mungkin dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai 2021-2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis 2021-2026 yang menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu tersebut. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang mencakup Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi pencapaian Sasaran akan dijelaskan dalam sub-bab ini, sedangkan uraian tentang target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan pada sub-bab mengenai Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2021-2026 adalah :

“MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING”

dengan 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi 1 Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia;
2. Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat;
3. Misi 3 Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup;
4. Misi 4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Melayani.

Misi-misi tersebut di atas dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai menjalankan misi ketiga yaitu meningkatkan mutu lingkungan hidup. Untuk memperjelas pernyataan Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan beberapa Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai sebagai berikut.

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)
		Meningkatnya kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKL)
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Persentase sampah tertangani
			Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut di atas, DLH Kabupaten Manggarai menjabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif, dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program dan kegiatan diperlukan untuk memberikan fokus pada pengalokasian sumber daya yang dimiliki organisasi, baik anggaran (dana), peralatan/perlengkapan maupun sumber daya manusia. Sasaran Strategis yang kemudian diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dibuat berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.

2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 IKU Dinas Lingkungan Hidup 2021 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IPj = \sqrt{\frac{(\frac{Ct}{Lij_M})^2 + (\frac{Ct}{Lij_A})^2}{2}}$
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - (\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1))$
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK) \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3	Persentase sampah yang dapat tertangani	Persentase Sampah yang dapat tertangani = (volume sampah yang dapat ditangani / volume produksi sampah) x 100 %
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 = (Jumlah pelaku usaha yang taat / jumlah pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3) x 100

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan memiliki anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang

telah disepakati. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2024 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)	72,00
2.	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)	88,37
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	85,32
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Persentase sampah tertangani	25,44 %
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	36,35 %

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.133.380.971
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	472.911.000
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	63.341.000
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	69.665.000
6.	Program Pengelolaan Persampahan	3.949.634.618
Jumlah		7.938.932.589

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

3.1 Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Indikator- indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai telah merencanakan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2024 untuk mencapai **4 (empat) sasaran**. Secara rinci tingkat capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks kualitas air (IKA)	72,00	61,25	85,07
Kategori					MEMUASKAN
2.	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks kualitas udara (IKU)	88,37	92,19	103,7
Kategori					MEMUASKAN
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	85,32	74,53	87,35
Kategori					MEMUASKAN
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Persentase sampah tertangani	25,44%	12,52 %	49,21
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	36,35%	76,47 %	210,3
Rata –Rata			61,79	88,99	144,02
Kategori					MEMUASKAN
Rata –Rata Sasaran 1 – 4					105,03%
Kategori					MEMUASKAN

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.133.380.971	3.053.122.129	97,44
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	472.911.000	471.297.180	99,9
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	224.981.022	99
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	63.341.000	55.526.293	87,86
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	69.665.000	69.505.000	99,9
6.	Program Pengelolaan Persampahan	3.949.634.618	3.901.488.650	98,9
Jumlah		7.938.932.589	7.775.910.274	97,95

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja dari sasaran **1 (satu)** yaitu Meningkatnya Kualitas Air Hasil adalah sebesar 85.07% dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN. Capaian kinerja sasaran **2 (dua)** yaitu Meningkatnya Kualitas Udara adalah sebesar 103.7% dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN. Capaian kinerja sasaran **3 (tiga)** yaitu Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan adalah sebesar 87.35% dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN. Capaian kinerja sasaran **4 (empat)** yaitu Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 adalah sebesar 144,02% dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN. Rata-rata capaian kinerja dari **4 (empat) sasaran** adalah **105,03 %** dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai tahun 2024 adalah 6 program. Anggaran perubahan yang disediakan untuk melaksanakan program-program tersebut sejumlah Rp **7.938.932.589** dan Realisasi anggaran yaitu sejumlah Rp **7.775.910.274** dengan demikian capaian realisasi keuangan adalah sebesar **97,95 %**.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai tahun 2024 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja akan membandingkan target dan realisasi serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun realisasi dan capaian tahun 2024, menjadi realisasi dan capaian awal periode RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026. Tahun 2024 menjadi awal dari periode RPJMD 2021-2026 pada lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup pada Renstra periode 2021-2026 mengalami perubahan dibandingkan dengan periode 2016 – 2021, namun ada beberapa indikator kinerja yang masih sama atau memiliki data tahun sebelumnya. Dengan demikian, perbandingan dengan tahun sebelumnya hanya berlaku pada indikator kinerja yang memiliki data. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Air

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	71,50	56,25	78,6	72,00	61,25	85,07

Tabel 3.2.2 Klasifikasi Kategori IKA

No	Kategori	Angka Rentang
1	Tinggi	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Capaian kinerja indeks kualitas air 2024 dibandingkan 2023 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air semakin baik.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas air memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA). Target IKA 2024 adalah **72,00**, realisasi IKA 2024 adalah **61,25** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **85,07%**. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi IKA 2024 kurang dari target IKA 2024. Berdasarkan Tabel klasifikasi IKA dari PermenLHK No. 27 Tahun 2021, angka ini termasuk dalam kategori **SEDANG**.

Pengujian IKA dilakukan pada sampel air sungai yang dipilih dari DAS dengan kriteria bahwa sungai tersebut merupakan sungai lintas kabupaten atau merupakan sungai prioritas yang akan dikendalikan pencemarannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melakukan pengujian IKA pada 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Wae Mese dan DAS Wae Pesi.

Hasil perhitungan akumulasi hasil IKA tahap pertama dan tahap kedua dengan rumus dari PermenLHK No 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Permutu Air DAS Wae Mese dan DAS Wae Pesi tahap akhir Kabupaten Manggarai adalah 61,25 dari target 62,38 dengan kategori **SEDANG** rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.3 Data Mutu Air berdasarkan titik sampel

No	Mutu Air	Jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air	Persentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air
1	Memenuhi Baku Mutu	9	56%	70	39,38
2	Cemar Ringan	7	44%	50	21,88
3	Cemar Sedang	0	0	30	0
4	Cemar Berat	0	0	10	0
Total		16	100%	6,04	61,25

Sumber: Bidang PPKLH DLH Kab. Manggarai Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas air Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut. Penganggung jawab program ini adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup (PPKLH). Anggaran yang disediakan sebesar Rp. **250.000.000,-** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar **89,99%** atau sebesar Rp. **224.981.022**

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Udara

Tabel 3.2.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Udara

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks kualitas udara (IKU)	88,37	93,27	105	88,37	92,19	103,7

Tabel 3.2.5 Klasifikasi Kategori IKU

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber: PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Capaian kinerja indeks kualitas udara Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 mengalami penurunan. Namun tidak signifikan dan masih dalam rentang angka yang tinggi. Sasaran strategis meningkatnya kualitas udara memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU). Target IKU 2024 adalah **88,37**, realisasi IKU 2024 adalah **92,19** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **103,7 %**. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi IKU 2024 melebihi target IKU 2024. Selain itu jika dibandingkan dengan tabel Klasifikasi Kategori IKU berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 masuk dalam kategori **Sangat Baik**. IKU merupakan suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kualitas udara berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter- parameter polusi udara yang berhubungan, menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dilakukan melalui pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Manggarai melalui metode *passive sampler* dengan parameter NO₂ (Nitrogen dioksida) dan SO₂ (Sulfur dioksida). Nilai IKU 2022 sebesar **92,19** masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan kualitas udara di wilayah pengujian sangat baik dan hasil pengukuran parameter kualitas udara masih dibawah baku mutu. Berikut data hasil pemantauan kualitas udara pada 4 lokasi sesuai peruntukannya.

Tabel 3.3.6 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2024

No	Lokasi	Peruntukan	Metode Pemantauan	Kadar No ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Kadar SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	Jl. Ranaka Kel Carep Kec. Langke Rembong	Transportasi	Manual Passive	7,34	7,75
2	PT. Nutraco Pratama (Industri Kopi Bubuk Flores) Jln. Wae Ces Kelurahan Tadong -Kec. Langke Rembong	Industri	Manual Passive	9,54	10,46
3	Perumnas Mena Kel. Compang Tuke Kec. Langke Rembong	Pemukiman	Manual Passive	2,80	3,45
4	Depan Kantor BP4/BAPPELITBANG Kel. Tenda Kec. Langke Rembong	Perkantoran	Manual Passive	4,47	4,77
Rata-rata				6,04	6,61

Sumber: Bidang PPKLH DLH Kab. Manggarai Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut. Penganggung jawab program ini adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH). Anggaran yang disediakan sebesar Rp. **250.000.000,-** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar **89,99%** atau sebesar Rp. **224.981.022.**

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 3.2.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	85,32	75,33	88	85,32	74,53	87,35

Sasaran strategis meningkatnya kualitas tutupan lahan memiliki indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Target IKTL 2024 adalah **85,32**, realisasi IKTL 2024 adalah **74,53** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **87,35 %**, dengan kategori **BAIK**. Angka ini menunjukkan bahwa realisasi IKTL 2024 kurang dari target IKTL 2024.

Hasil analisis tutupan lahan berdasarkan sumber data citra satelit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. IKTL menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap kabupaten yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kualitas tutupan lahan secara tidak langsung memiliki kontribusi besar dalam perubahan kualitas air sungai dan pencemaran udara. Jika persentase luas tutupan lahan masih lebih besar dari total luas wilayah suatu daerah, dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan di daerah tersebut masih cukup baik. Jika kualitas tutupan lahan masih terjaga, maka secara tidak langsung ikut menjaga kualitas air sungai dan tingkat pencemaran udara.

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tutupan lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan laut. Penganggung jawab program ini adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH). Anggaran yang disediakan sebesar Rp. **250.000.000,-** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar **89,99%** atau sebesar Rp. **224.981.022.**

Sasaran 4 : Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3

Tabel 3.2.8 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase sampah tertangani	23,21 %	11,97 %	51,5	25,44 %	12,52 %	49,21
2	Persentase ketaatan Spelaku usaha penghasil limbah B3	26,13 %	61,81 %	236,5	36,35 %	76,47 %	210,3
Rata-rata							144,02

Sasaran Strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 memiliki 2 indikator kinerja yaitu presentase sampah tertangani dan persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah persentase. Capaian dari sasaran strategis ini adala **144,02%**. Target persentase sampah tertangani Tahun 2024 adalah **25,44%**, realisasinya adalah **12,52 %** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **49,21**

%. Persentase ini menunjukkan bahwa realisasi persentase sampah tertangani Tahun 2024 kurang dari target Tahun 2024.

Sarana pengangkutan sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kab. Manggarai antara lain Dumptruck sejumlah 4 dengan kapasitas 9 m³, Armroll 4, Roda Tiga 21 unit dan Container 7. Pelayanan sampah di Kabupaten Manggarai setiap harinya berpusat pada wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Reok (4 Kelurahan yaitu Wangkung, Mata Air, Baru dan Reo) dan satu kali pengangkutan di Wilayah Cancar dan Pagal. Berdasarkan data dari bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas DLH Kab. Manggarai realisasi penanganan sampah melalui pengumpulan dan pengangkutan selama tahun 2024 adalah 41.748 m³. Perhitungan Presentase sampah tertangani dilakukan dengan cara membandingkan Jumlah Sampah yang dapat ditangani (m³/ perhari) dengan jumlah timbunan sampah kabupaten dikali 100% sehingga diperoleh angka 12,21 %.

Target persentase sampah tertangani Tahun 2024 merupakan target untuk seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Sementara wilayah pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai hanya mencakup 4 Kecamatan dari total 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai. Kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan persampahan yaitu Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Reok, Kecamatan Cibai, dan Kecamatan Ruteng. Sebagian besar pelayanan persampahan dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Langke Rembong, dan Kecamatan Reok hanya untuk 4 Kelurahan di Kota Reok, sementara pada wilayah Kecamatan Cibai dan Ruteng hanya dilaksanakan pada wilayah pusat kecamatan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan sarana yang ada hanya cukup untuk beberapa kecamatan tersebut.

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatkan pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 dengan indikator kinerja presentase sampah tertangani, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pengelolaan sampah dengan Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengangkutan, penanggung jawab Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas. Anggaran perubahan yang disediakan sebesar Rp. **3.949.634.618,-** dengan

tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,78 % atau sebesar Rp. **3.901.488.650,-**

Indikator kedua dari sasaran strategis meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 adalah persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3. Target persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2024 adalah **36,35%**, realisasi ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2024 adalah **76,47 %** dan persentase capaian target kinerja adalah sebesar **210,3%**. Nilai ini menunjukkan bahwa persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 Tahun 2024 lebih dari target Tahun 2024. Berdasarkan data pengawasan yang dilaksanakan selama Tahun 2024, terdapat 37 usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha yang dinyatakan taat sebanyak 12 usaha dan/atau kegiatan dimana rutin menyampaikn laporan semester implementasi pengelolaan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 dengan indikator kinerja persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai melaksanakan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3, penanggung jawab Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. **63.341.000,-** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 87,66% 55.526.293

3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Renstra 2021 – 2026

Perbandingan antara capaian kinerja tahun anggaran 2024 dengan target dalam Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sampai Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	%
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks kualitas air (IKA)	72,50	61,25	84.48
2.	Indeks kualitas udara (IKU)	88,87	92,19	103.74
3.	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	86,32	74,53	86.34
4.	Persentase sampah tertangani	29,91%	12,52 %	41.86
	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	46,57%	76,47 %	164.20
	Rata – rata sasaran 4	76,48%	88,99 %	96,12
Rata-rata sasaran 1-4				96,12

Capaian kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan dengan targer akhir Renstra 2026 adalah **96,12%**. Sasaran 2 (dua) dan Sasaran 4 (empat) telah mencapai lebih dari atau sama dengan 100 %, Sasaran 1 (satu) telah mencapai 84,48 % dan sasaran 3 (tiga) mencapai 86,34 %.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

3.4.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 menurut sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.1.1 Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	250.000.000	224.981.022	89,99
2.	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	250.000.000	224.981.022	89,99
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	250.000.000	224.981.022	89,99
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	Presentase Sampah Tertangani	3.949.634.618	3.901.488.650	98,78
		Presentase Ketaatan Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	63.341.000	55.526.293	87,66

Realisasi anggaran diatas, jika dibanding dengan menggunakan Tabel Interval pada Tabel 3.1.1 dari Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka ada 4 (empat) indikator kinerja yang memiliki kategori capaian realisasi anggaran SANGAT TINGGI dan ada 1 (satu) sasaran yang masuk kategori capaian anggaran TINGGI. Indikator Kinerja IKU, IKA, IKTL dan presentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3 memiliki nilai capaian kinerja dengan kategori SANGAT TINGGI. Sedangkan capaian anggaran indikator kinerja presentase sampah tertangani termasuk dalam kategori TINGGI.

3.4.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja. Penggunaan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.2.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO.	SASARAN	Capaian (%)	Penyerapan Anggaran	Efisien/ Tidak Efisien
1.	Meningkatnya Kualitas Air	85,07	89,99	Tidak Efisien
2.	Meningkatnya kualitas Udara	103,7	89,99	Efisien
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	87,35	89,99	Tidak Efisien
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3	144,02	93,22	Efisien
Rata-rata sasaran 1-4		105,03%	90.79%	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel 3.4.2.1 tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada sasaran strategis. Rata-rata pencapaian sasaran strategis **105,05%** dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada sasaran strategis sebesar **90.79%**, menunjukkan penyerapan anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai yang **efisien**. Hal tersebut karena capaian sasaran startegis lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggarannya.

3.4.3. Realisasi Anggaran Seluruh Program dan Kegiatan

Pagu dan realisasi anggaran untuk seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.3.1 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.006.382.977	3.133.380.971	3.053.122.129
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.877.000	27.137.000	27.037.000
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.730.000	3.730.000	3.670.000
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.247.000	1.247.000	1.247.000
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.900.000	22.160.000	22.120.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.938.582.745	3.045.064.039	2.969.209.609
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.912.182.745	3.018.664.039	2.943.109.609
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.400.000	26.400.000	26.100.000
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.623.232	22.879.932	22.870.700
	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.623.232	17.522.232	17.513.000
	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	5.357.700	5.357.700
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.500.000	13.500.000	10.570.900
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.000.000	13.000.000	10.070.900
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.800.000	24.800.000	22.423.920
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	24.800.000	24.800.000	22.423.920	
II.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	472.911.000	472.911.000	471.297.180
	7. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	472.911.000	472.911.000	471.297.180
	b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	472.911.000	472.911.000	471.297.180
III.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	250.000.000	224.981.022

	8. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	224.981.022
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	174.900.000	174.900.000	154.188.022
	b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	75.020.000	75.020.000	70.793.000
V.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	63.341.000	63.341.000	55.526.293
	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	63.341.000	63.341.000	55.526.293
	a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	63.341.000	63.341.000	55.526.293
VI.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	69.665.000	69.665.000	69.505.000
	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.665.000	69.665.000	69.420.000
		Jumlah Anggaran (Rp.)		
	a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	31.363.000	31.363.000	31.278.000
	b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.302.000	38.302.000	38.142.000
IX.	Program Pengelolaan Persampahan	3.949.634.618	3.949.634.618	3.901.488.650
	1. Pengelolaan Sampah	3.949.634.618	3.949.634.618	3.901.488.650
	a. Penanganan Sampah melalui pengangkutan	3.949.634.618	3.949.634.618	3.901.488.650
	Jumlah	7.832.451.177	7.938.932.589	7.775.825.274

BAB IV**PENUTUP**

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 4 (*empat*) sasaran adalah **105,03 %** dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN. Capaian kinerja sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya Kualitas Air Hasil adalah sebesar 85.07% dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN. Capaian kinerja sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kualitas Udara adalah sebesar 103.7 % dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN. Capaian kinerja sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan adalah sebesar **87,35 %** dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN. Capaian kinerja sasaran 4 (*empat*) yaitu Meningkatnya pengelolaan persampahan dan pengelolaan Limbah B3 Meningkatnya Kualitas Udara adalah sebesar **144,02%** dan termasuk dalam kategori MEMUASKAN.

Dengan memperhatikan tingkat capaian sasaran tersebut di atas maka untuk sasaran-sasaran yang sudah memperoleh predikat MEMUASKAN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai bertekad untuk terus mempertahankannya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2024 ini disusun sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran tersebut.

Ruteng, 12 Februari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN MANGGARAI,



CHARLESSON Z.RIHIMONE,S.Kom

Pembina Tkt.I

NIP. 19720601 200003 1 010

